

**ANALISIS KOGNITIF *FRAMEWORK* DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh

Daffa Anugrah Putra Rahmadani

NIM. 190563201091

ABSTRAK

Penyandang disabilitas pada hakekatnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya, sehingga ketersediaan aksesibilitas diharapkan dapat memudahkan segala layanan terutama pada fasilitas umum. Fasilitas penting bagi mereka agar mendapatkan kesamaan hak tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa aktor di lapangan belum optimal dalam mengimplementasikan Perda No. 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang? a) Bagaimana kognitif *frame* para aktor pembuat kebijakan perda ini. b) Dan bagaimana kognitif *frame* para aktor pelaksana kebijakan Perda ini. Bertujuan, yaitu; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa aktor pembuat dan pelaksana kebijakan di lapangan belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan Perda No.4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang. Menggunakan konsep kognitif *frame* diambil dari teori Jens Beckert (2010) dengan berupaya membedah isi kepala dari aktor pembuat dan pelaksana kebijakan, bersumber dari primer dan sekunder serta melalui data dokumentasi dan wawancara terhadap setiap aktor yang terlibat. Hasil penelitian ini mengemukakan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penulis dapat mengetahui apa isi kepala aktor dalam implementasi penyelenggaraan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang tidak terlaksana secara optimal. Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat aktor pembuat dan aktor pelaksana kebijakan, selain itu penelitian ini juga mengemukakan tantangan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan, seperti: kebijakan yang tidak diprioritaskan, anggaran yang tidak memadai dan jumlah penyandang disabilitas yang dianggap minim.

Kata Kunci: Penyandang disabilitas, Kognitif *Framework*, Implementasi Kebijakan

**COGNITIVE FRAMEWORK ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF
LOCAL REGULATION NO. 4 OF 2017 ON ORGANIZING THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES IN TANJUNGPINANG CITY 4/2017 ON
ORGANIZING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN
TANJUNGPINANG CITY.**

To

Daffa Anugrah Putra Rahmadani

NIM.190563201091

ABSTRACT

People with disabilities essentially have the same rights as other normal people, so the availability of accessibility is expected to facilitate all services, especially in public facilities. Facilities are important for them to get equal rights without discrimination. Therefore, the problem formulation in this research is: Why actors in the field have not been optimal in implementing Perda No. 4 of 2017 concerning the Implementation of the rights of persons with disabilities in Tanjungpinang City? a) How is the cognitive frame of the actors making this regional regulation. b) And how is the cognitive frame of the actors implementing this policy. To describe and analyze why policy-making and implementing actors in the field have not fully implemented the policy of Perda No.4 of 2017 concerning the implementation of the rights of persons with disabilities in Tanjungpinang City. Using the concept of cognitive frames taken from the theory of Jens Beckert (2010) by attempting to dissect the contents of the heads of policy-making and implementing actors, sourced from primary and secondary as well as through documentation data and interviews with each actor involved. The results of this study suggest that there are challenges in implementing the policy. So, the author can find out what the content of the actor's head is in the implementation of the implementation of rights for persons with disabilities in Tanjungpinang City is not optimally implemented. The conclusion obtained in this study is that in implementing policies there are actors who make and implement policies, besides that this study also suggests challenges that occur during implementation, in terms of: policies that are not prioritized, inadequate budgets and the number of people with disabilities who are considered minimal.

Keywords: People with Disabilities, Cognitive Framework, Policy Implementation